Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 7, Nomor 1, 2026: 63-78
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

THE EFFECT OF REGIONAL WEALTH, INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS, CAPITAL EXPENDITURE, AND GOVERNMENT SIZE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE IN JAMBI PROVINCE FOR 2019–2024

PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DIPROVINSI JAMBI TAHUN 2019– 2024

Helpiana Tarigan [1)*]

Yudi [2)]

Nyimas Dian Maysarah [3)]

1)Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesrsitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: helpianatarigan367@gmail.com[1)], yudi.telanai@gmail.com[2)], nyimasdianmaysarah@gmail.com[3)]

Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 7, No. 1, Januari - April 2026: 63-78
DOI: http://10.22437/jar.v7i1.54567

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of regional wealth level, intergovernmental transfer funds, capital expenditure, and government size on financial performance in regencies/municipalities in Jambi Province during the period 2019–2024. The population of this study consists of all regencies/municipalities in Jambi Province from 2019 to 2024. The sampling technique used is saturated sampling, resulting in 66 data samples. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis with IBM SPSS version 27 as the analytical tool. The results of this study indicate that (1) regional wealth level has no effect on the financial performance of regencies/municipalities in Jambi Province, (2) intergovernmental transfer funds have no effect on the financial performance of regencies/municipalities in Jambi Province, (3) capital expenditure has a significant effect on the financial performance of regencies/municipalities in Jambi Province, and (4) government size has no effect on the financial performance of regencies/municipalities in Jambi Province.

Keyword: *Regional Wealth Level, Intergovernmental Transfer, Capital Expenditure, Government Size, Local Government Financial Performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2024. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 66 sampel yang terdiri dari Kabupaten/Kota di Provinsi tahun 2019-2024. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik sampel jenuh. Analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda, menggunakan IBM SPSS Versi 27 sebagai alat analisis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, (2) dana perimabangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, (3) belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja kauangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, (4) ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Tingkat Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengelola urusan pemerintahan yang bertugas sebagai pelayan publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengembangkan perekonomian serta memberdayakan ligkungan dan juga manusia dalam mengembangkan suatu daerah. Dalam mendukung kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat serta meningkat fasilitas umum dan infrastruktur dalam meningkatkan aktivitas dan perekonomian Putri & Priyadi (2021). Untuk mendukung peran tersebut maka pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah Wulandari dkk (2023).

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan oleh peningkatan pendapatan asli daerah Primadiva dkk (2021). Tingkat Kekayaan daerah diukur dari seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan di daerah tersebut maka semakin tinggi juga tingkat kekayaan di daerah tersebut. sumber pendapatan asli daerah adalah keuangan daerah yang dihasilkan dari wilayah tersebut yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi dapat mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya pengoptimalan sumber daya yang dimiliki.

Pengalokasian dana perimbangan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan harapan pemerintah daerah mampu membiayai pembangunanya dan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan baik. Dana perimbangan dialokasikan kepada daerah sesuai dengan potensi dan kemandirian daerahnya masing-masing, serta pengalokasian dana perimbangan juga disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah tersebut dan kebutuhan area publik yang dapat mendukung aktivitas masyarakat Pradana & Handayani (2023).

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh aset berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal juga digunakan untuk memperpanjang umur aset tetap seperti pemeliharaan dan peningkatan kapasitas aset tetap. Belanja modal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong investasi yang mendorong pendapatan asli daerah Febrianty & Putra (2023).

Ukuran Pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan jumlah aset yang dimiliki pemerintah. Ukuran pemerintah merupakan bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah, ukuran pemerintah dapat diukur dengan total aset yang dimiliki oleh suatu daerah Riani & Rajana (2022). Selain dengan aset ukuran pemerintah daerah juga dapat diukur dengan jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran Pemerintahan yang besar akan memiliki kemudahan

kegiatan operasional karena jumlah aset yang dimiliki memadai untuk melakukan pelayanan publik tanpa tergantung pada dana perimbangan Safitri dkk (2022).

KAJIAN PUSTAKA

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah terori *stewardship*, teori *stewardship* adalah teori yang memberikan gambaran bagaimana pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumberdaya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat *(principal)*. Teori ini dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989. Teori *Stewardship* berpendapat pemerintah akan terdorong untuk melakukan pekerjaan nya untuk masyarakat dalam menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dipercayakan Subroto & Endryanti, (2023). Teori *Stewardship* dapat digunakan sebagai pendorong dan penyusunan anggaran pemerintah lebih baik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah Merchilia & Robinson, (2024).

Kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan publik, termasuk pendapatan dan belanja dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Nasution dkk (2023). Kinerja keuangan daerah merupakan capaian dari berhasil atau tidaknya pengelolaan keuangan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi pemerintah. Menurut Permendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, tentang pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan tolak ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggara

Tingkat kekayaan adalah proksi dari pendapatan asli, tingkat kekayaan merupakan sumber pendapatan asli daerah Aggatha dkk (2023). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, tingkat kekayaan daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Tingkat kekayaan daerah terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendukung pelaksana kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi, terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, yang bersumber dari pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan sesuai dengan tujuannya Elsye, (2020). Dana Perimbangan terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang nilai asetnya sebesar harga beli aset yang ditambah sampai aset siap digunakan Ariadi,

(2021). Belanja modal diterapkan pada pemerintah daerah yang telah melaksanakan otonomi yang digunakan sebagai salah satu inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan pemerintah dalam kegiatan yang memberikan manfaat untuk masyarakat Sunandi & Astawa, (2021).

Besar atau kecilnya ukuran pemerintah ditunjukkan dengan besarnya aset yang di pemerintah disebut ukuran pemerintah, Ukuran pemerintah yang besar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara tidak langsung, jika pemerintah sanggup mengelola dengan baik seluruh potensi-potensi yang dimiliki daerahnya serta bisa memanfaatkan sumber-sumber potensi dimiliki (Aulia & Rahmawaty, 2020). Ukuran pemerintahan yang besar memiliki banyak kemudahan dalam mengungkapkan seberapa besar peningkatan kinerja keuangan suatu pemerintah (Adinata & Efendi, 2022).

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H_2 : Dana Peimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H_3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H_4 : Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari Laporan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Masa tenggang yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam tahun berturut-turut, dari 2019 hingga 2024. Data diperoleh melalui website DJKP RI. Objek penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah, dana saldo, belanja modal, ukuran pemerintahan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari sebelas kabupaten dan kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yang menghasilkan 66 data sampel.

Kinerja Pemerintah Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan rasio antara jumlah pengeluaran yang direalisasikan

yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut (Patarai, 2016).

$$\text{Efficiency Ratio} = \frac{\text{Expenditure Realization}}{\text{Revenue Realization}} \times 100$$

Tingkat Kekayaan Regional

Tingkat kekayaan daerah adalah proksi untuk pendapatan yang dihasilkan secara lokal, karena mencerminkan pendapatan sumber sendiri di kawasan tersebut (Aggatha dkk., 2023). Menurut Undang-Undang No.33 Menurut UU No. 33 Tahun 2004, tingkat kekayaan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dihasilkan dan dimanfaatkan sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan kegiatan daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Untuk menentukan tingkat kemandirian daerah, dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Aziz & Kusumawati, 2024).

$$\text{Regional Wealth Level} = \frac{\text{Source Revenue}}{\text{Total Revenue}} \text{X } 100\%$$

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN (*APBN*) mendukung implementasi otoritas pemerintah daerah dalam mencapai otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dana perimbangan digunakan dari pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan dialokasikan sesuai dengan tujuannya masing-masing (Elsye, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diukur pengaruh transfer antarpemerintah terhadap kinerja pemerintah dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Rahmadan & Rahardjo, 2024):

$$\text{Intergovernmental Transfers} = \frac{\text{Total Intergovernmental Transfers}}{Total\ Revenue} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal mengacu pada pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat untuk lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset ini diukur berdasarkan biaya akuisisi ditambah semua biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan (Ariadi, 2021). Untuk mengukur proporsi belanja modal, rumus berikut digunakan (Lestari., 2019):

$$\text{Capital Expenditure} = \frac{\text{Total Expenditure Realization}}{Total\ Capital\ Expenditure} \text{X } 100\%$$

Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintahan mengacu pada skala pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Ukuran pemerintah yang lebih besar secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan yang dihasilkan secara lokal, asalkan pemerintah mampu mengelola potensi daerahnya secara efektif dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Aulia & Rahmawaty, 2020). Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah diukur dengan total aset yang diubah menjadi logaritma alami (Ln), dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Ukuran Pemerintah = Ln (Total Aset)

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *IBM SPSS Versi 29*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah, transfer antar pemerintah, belanja modal, dan ukuran pemerintahan, sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Deskripsi Variabel, Y Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Konstanta α, Koefisien Regresi β1, β2, β3, β4, X_1 Tingkat Kekayaan Daerah, X_2 Dana Perimbangan, X_3 Belanja Modal, X_4 Ukuran Pemerintahan, e eror.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini model regresi uji asumsi klasik yang digunakan telah sesuai, dimana uji Normalitas yang dilakukan menunjukkan nilai residual terdistribusi nornal dengan nilai signifikan 0,200 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Pada data juga tidak terjadi multikolonieritas dengan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Pada pengujian heterokedastisitas menggunakan uji glajser juga diperoleh nilai signifikansi > 0,05. Maka hasil ini menunjukkan data layak dianalisis.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			66
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		4,60200063
Most Extreme Differences	Absolute		,073
	Positive		,073
	Negative		-,062
Test Statistic			,073
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		,504
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,491
		Upper Bound	,517

Hasil Regresi Linier Berganda

Uji parsial (*uji-t)* dilakukan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki nilai signifikansi 0,419, yang lebih besar dari 0,05 (0,419 > 0,05); oleh karena itu, hipotesis H1 ditolak. Transfer antarpemerintah memiliki nilai signifikansi 0,260, yang juga lebih besar dari 0,05 (0,260 > 0,05); dengan demikian, hipotesis H2 ditolak. Belanja modal menunjukkan nilai signifikansi 0,001, yang kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05); oleh karena itu, hipotesis H3 diterima. Ukuran pemerintah memiliki nilai signifikansi 0,103, yang lebih besar dari 0,05 (0,103 > 0,05); dengan demikian, hipotesis H4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa, sebagian, sebagian besar variabel independen tidak memiliki efek signifikan pada variabel dependen, kecuali untuk belanja modal. Koefisien penentuan menunjukkan bahwa nilai R-kuadrat yang disesuaikan adalah 0,188 atau 18,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan 18,8% variasi variabel dependen, sedangkan 81,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	200,290	67,064		2,987	,004		
	Tingkat kekayaan daerah	,117	,144	,120	,814	,419	,578	1,731
	Dana Perimbangan	,076	,067	,143	1,136	,260	,786	1,272
	Belanja Modal	,485	,121	,616	4,021	,000	,532	1,879
	Ukuran Pemerintah	-4,086	2,470	-,289	-1,654	,103	,410	2,438
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah								

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 200{,}290 + 0{,}117X_1 + 0{,}076\ X_2 + 0{,}485\ X_3 + -4{,}086\ X_4$$

Nilai konstan -305.494 menunjukkan bahwa ketika tingkat kekayaan daerah, transfer antar pemerintah, dan ukuran pemerintah tetap konstan, nilai kinerja keuangan pemerintah daerah menurun sebesar 305.494. Koefisien regresi untuk variabel tingkat kekayaan regional (X1) adalah -0,314. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit tingkat kekayaan daerah akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,314. Koefisien regresi untuk variabel transfer antarpemerintah (X2) adalah -4,602. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam transfer antarpemerintah akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 4.602.

Koefisien regresi untuk variabel ukuran pemerintah (X3) adalah 15,998. Nilai positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam ukuran pemerintahan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 15.998. Koefisien regresi variabel belanja modal (X_3) adalah 0,485. Nilai positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja modal satu unit akan men88ingkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,485. Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah (X4) adalah -4,086. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam ukuran pemerintah akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 4.086.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} variabel tingkat kekayaan daerah sebesar 0,814 dengan nilai signifikansi 0,419 lebih besar dari 0,05 mengidentifikasi bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis pertama (H1) dengan pernyataan tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak.

Tingkat kekayaan tidak selalu diiringi dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Tidak berpengaruhnya tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Rendahnya tingkat kekayaan terhadap kinerja keuangan dapat dilihat dari gambar 1.1, dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kekayaan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki persentase 3,85% sampai 26,19%. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Penurunan tingkat kekayaan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah masih berfokus menggunakan dana tersebut untuk memenuhi belanja daerahnya. Selain itu itu pemerintah daerah juga masih sangat bergantung pada pajak kendaraan, pertambangan dan pertanian. Sementara pada sektor pariwisata, sektor budaya dan pembangunan UMKM belum diperhatikan secara maksimal. Selain kurangnya perhatian pemerintah pada beberapa sektor yang telah disebutkan, pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan di berbagai sektor akibat dari pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Kusumawati (2024), dan Setiawan dkk (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa setiap kenaikan tingkat kekayaan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator pengukur tingkat kekayaan daerah yang digunakan adalah total pendapatan daerah tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang oleh Primadiva dkk (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan diukur dengan dana perimbangan dibandingkan dibandingkan dengan total pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} variabel tingkat kekayaan sebesar 1,136 dengan nilai signifikansi 0,260 lebih besar dari 0,05 mengidentifikasi bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis pertama (H2) dengan pernyataan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak.

Nilai dana perimbagan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi relatif sama dan stabil antara daerah maupun antar tahun. hal ini mengidentifikasi bahwa peningkatan dana perimbangan setiap daerah sangat besar. Tidak berpengaruhnya dana perimbangan disebabkan sempitnya variasi dana perimbangan sehingga kontribusinya dalam menjelaskan kinerja keuangan daerah sangat terbatas. Selain itu dana perimbangan hanya menjelaskan besarnya dana transfer yang diterima Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bukan efisiensi pengelolaannya. Tingginya penerimaan dana perimbanagn setiap daerah mengidentifikasi seberapa tinggi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, pernyataan ini dapat dilihat dari tabel 4.2, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan persentase tertinggi yaitu 80,01% sampai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan keuangan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ada oleh Niswani dkk (2022), Fadilah & Andrian (2025) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator pengukur dana perimbangan yang digunakan adalah dana perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang oleh Putri & Lailatul (2020) dan Niswani dkk (2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H_3) pada penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan diukur dengan belanja modal terhadap total belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} variabel belanja modal sebesar 4,021 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 mengidentifikasi bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka hipotesis pertama (H_3) dengan pernyataan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan diterima.

Peningkatan belanja modal selalu diiringi dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi total belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Tinggi rendahnya belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel 4.3, dari data tersebut diketahui bahwa belanja modal tertinggi berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai 25,48% sampai 40,97%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi fokus meningkatkan tujuan pembelian, pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki manfaat jangka panjang. Pemanfaatan belanja modal yang baik mampu menambah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang oleh Digdowiseiso dkk (2022) dan Maulina dkk (2021) yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa setiap kenaikan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Indikator yang digunakan untuk mengukur belanja modal adalah realisasi total belanja daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H_4) pada penelitian ini menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan total aset dan ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai thitung variabel ukuran pemerintah sebesar -1,654 dengan nilai signifikansi 0,103 lebih besar dari 0,05 mengidentifikasi bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis pertama (H4) dengan pernyataan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak.

Nilai Ln ukuran pemerintah relatif sama dan stabil antara maupun antar tahun. Hal ini mengidentifikasi bahwa peningkatan ukuran pemerintah daerah relatif stabil. Tidak berpengaruhnya ukuran pemerintah disebabkan oleh sempitnya variasi Ln ukuran pemerintah sehingga kontribusi dalam menjelaskan kinerja keuangan daerah sangat terbatas. Selain itu Ln ukuran pemerintahannya menjelaskan besarnya total aset yang dimiliki Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bukan efisiensi pengelolaan aset. Tingginya ukuran pemerintah setiap daerah mengidentifikasi seberapa besar aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pernyataan ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan Kota Jambi yang memiliki total aset paling tinggi yaitu 28,94% sampai 29,21%. Angka ini menunjukkan

bahwa Provinai Jambi memiliki total aset paling tinggi di antara lainnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang oleh Elsye, (2020). yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa setiap kenaikan total aset pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator yang digunakan untuk menilai ukuran pemerintah adalah Ln total aset yang tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang oleh Adinata & Efendi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut, tingkat kekayaan daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk periode 2019–2024. Dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024. Ukuran pemerintahan tidak mempengaruhi kinerja keuangan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk periode 2019–2024.

Bagi pemerintah daerah sebagai otoritas dalam mengelola keuangan diharapkan dapat menggali potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan kemandirian finansial sesuai dengan potensi dan otonomininya, lebih memperhatikan aset yang dimiliki dan memberdayakan tanah dan bangunan yang dimiliki sehingga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan pendapatan dan keuangan daerah. Bagi akademisi, penulis memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi tetapi dapat mencakup beberapa Provinsi di Indonesia atau bahkan antar daerah atau pulau. Selain memperluas objek penelitian, peneliti kemudian diharapkan untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari empat variabel yang diuji pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk periode 2019–2024, hanya belanja modal yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, variabel tingkat kekayaan daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah tidak

menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan belum mampu mengoptimalkan sumber daya mandiri serta efisiensi pengelolaan aset mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk lebih menggali potensi lokal guna meningkatkan kemandirian finansial, sementara bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian eksternal serta mempertimbangkan variabel-variabel lain yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Aggatha, N. P., Rahayu, S., & Inawati, W. A. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020. *ULASAN EKOMBIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 307–316. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2849

Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis* (G. Rueli & Y. Titis (eds.); Maurifah M). Deepenerbit.

Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(4), 584–598. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826

Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, *4*(2), 84–95. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8734

Dessy Riani, & Junita Putri Rajana Hrp. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, *3*(1), 311–317. https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.1282

Dwigantara, MP, & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(10), 1–22.

Elsye, R. (2020). *Alokasi Keyanga Daerah Berdasaikan Potensi Daerah* (A. Nury (ed.)). Alqaprint jatinagor.

Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada 19 Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi*, *1*(2), 30–46.

Lestari, K., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *4*(2), 53–67. https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7796

Nasution, A., Alif, M., & Harahap, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *14*(2), 70–74. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i2.3421

Nauw, E., & Riharjo, IB (2004). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Peribangan dan Belanja Modal Terhadap Kierja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dan Riset Akuntansi*, *6*(1), 1–17.

Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *6*(1), 430–443.

Patarai, M. I. (2016). *Kinerja Keuangan Daerah* (F. Goenawan (ed.); edisi ke-1). De La Macca.

Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, *2*(2), 192–209. https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979

Rahayu, Y. S., & Hendaris, R. B. (2025). *Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah , Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023). 09*(02), 1114–1125. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i2.2686

Rahmadan, M. N., & Rahardjo, S. N. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap*. *13*, 1–11.

Rangkuty, DM, Yusuf, M., & Pasaribu, RA (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, *11*(1), 42–52. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2640

Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemeritah, dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *5*(2), 401–409. https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695

Subroto, VK, & Endryanti, E. (2023). *Kumpulan Teori Akuntansi* (I. Yunianto (ed.); Wiwid wahy). Yayasan Prima Agus teknik. https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/509

Sunandi, KP, & Astawa, GPB (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *12*(03), 2614–1930.

Treza Tampubolon, L., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *15*(1), 25–31. https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151

Warman, A., & Arza, FI (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, *2*(2), 178–188. https://doi.org/10.24036/jnka.v2i2.46